



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2021-2022
KE PROVINSI SUMATERA UTARA
21-25 FEBRUARI 2022**

*

**

**

*

JAKARTA 2022



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2021-2022
KE PROVINSI SUMATERA UTARA
21-25 FEBRUARI 2022

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Sumatera Utara adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 59 ayat (4) butir d: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.
 - b. Pasal 59 ayat (5) butir f: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI Februari 2021.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI 12 Januari 2022.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kunjungan melaksanakan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Sumatera Utara adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan dalam rangka melaksanakan salah satu dari tiga fungsi DPR RI, yaitu fungsi pengawasan.

C. TUJUAN

Kunjungan Kerja ini merupakan bagian dari kewajiban konstitusional Dewan untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap program pemerintah, antara lain bertujuan:

1. Bidang Kelautan dan Perikanan (PPS Belawan):
 - a. Melihat secara langsung kondisi eksisting infrastruktur sarana dan prasarana serta tata kelola kelembagaan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan;
 - b. Mendapatkan gambaran secara komprehensif mengenai permasalahan nelayan, terutama tata kelola dan kebijakan Pelabuhan Perikanan Belawan di KKP;
 - c. Menyerap aspirasi nelayan dan stakeholder dalam rangka membangkitkan industri perikanan di Belawan.
2. Bidang Pertanian: Komisi IV DPR RI mengunjungi 3 lokasi untuk Bidang Pertanian, yaitu Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Komplek Pergudangan Bulog, dan Kantor Balai Karantina Pertanian Bandara Kualanamu.
 - a. Melihat secara langsung kondisi Balai dan pergudangan serta tata kelola kelembagaan yang diterapkan oleh Dinas Pertanian Sumatera Utara dan Kepala Divre Bulog Sumatera Utara;
 - b. Mendapatkan gambaran terkait dengan permasalahan yang terjadi di Balai Pertanian dan pergudangan yang dimiliki Perum Bulog Divre Sumatera Utara;
 - c. Menyerap aspirasi dari Dinas Pertanian, Perum Bulog, dan PT Pupuk Indonesia.
3. Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan:
 - a. Melihat secara langsung kondisi lahan penanaman mangrove dengan kegaitan Padat Karya Percepatan Rehabilitasi Mangrove di Kelurahan Nelayan Indah, Kec. Medan Labuh Kota Medan;
 - b. Melihat kondisi dan menyerap aspirasi dari masyarakat yang terlibat dalam Padat Karya Percepatan Rehabilitasi Mangrove di Kelurahan Nelayan Indah, Kec. Medan Labuh Kota Medan.

II. SUSUNAN TIM

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh Anggia Erma Rini, MKM (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI) serta para Anggota Komisi IV DPR RI.

III. PELAKSANAAN

A. PELAKSANAAN DAN LOKASI KUNJUNGAN

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan pada tanggal 21-25 Februari 2022. Kunjungan Reses ini dilakukan di Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Komplek Pergudangan Bulog, Kantor Balai Karantina Pertanian Bandara Kualanamu, Kegiatan Padat Karya Percepatan Rehabilitasi Mangrove di Kelurahan Nelayan Indah, Kec. Medan Labuh di Kota Medan.

B. GAMBARAN UMUM

1. Bidang Kelautan dan Perikanan

Potensi kelautan dan perikanan Sumatera Utara terdiri dari potensi perikanan tangkap dan perikanan budi daya, dimana potensi perikanan tangkap terdiri Potensi Selat Malaka sebesar 276.030 ton/tahun dan Potensi di Samudera Hindia sebesar 1.076.960 ton/tahun. Sedangkan produksi perikanan budi daya terdiri budi daya tambak 20.000 ha dan budi daya laut 100.000 ha, budi daya air tawar 81.372,84 ha, dan perairan umum 155.797 ha, kawasan pesisir Sumatera Utara mempunyai panjang pantai 1300 km yang terdiri dari panjang pantai timur 545 km, panjang pantai barat 375 km, serta Kepulauan Nias dan Pulau-Pulau Baru sepanjang 350 km.

Adapun pengembangan kelautan dan perikanan di Provinsi Sumatera Utara dibagi menjadi 3 yang terdiri dari:

a) Wilayah Pantai Barat Sumatera Utara

Terdiri dari 12 kabupaten/kota yang berada di wilayah Pantai Barat yaitu Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Tapanuli

Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara. Terkait potensi pengembangan pada wilayah ini adalah penangkapan ikan, pengolahan ikan. Budi daya Laut yang terdiri dari rumput laut, kerapu dan kakap, budi daya tawar yang terdiri dari mas, nila, lele, patin, gurame, tawes, dan nilam. Budi daya tambak yang terdiri dari udang vaname, udang windu, kerapu, kakap, bandeng.

b) Wilayah Dataran Tinggi Sumatera Utara

Kabupaten/Kota yang termasuk pada wilayah dataran tinggi Sumatera Utara adalah wilayah yang berada di wilayah tengah Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 10 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Simalungun, Kota Pematang Siantar, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Pakpak Barat. Terkait potensi pengembangan pada wilayah ini terdiri dari penangkapan ikan di perairan umum, pengolahan ikan, budi daya air tawar yaitu nila, mas, lele, patin, dan gurame.

c) Wilayah Pantai Timur Sumatera Utara

Terdapat 11 kabupaten/kota yang termasuk pada wilayah Pantai Timur Sumatera Utara yang terdiri dari Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Batubara, Kota Medan, Kota Tanjung Balai, dimana potensi pengembangan di wilayah timur Sumatera Utara adalah penangkapan ikan, pengolahan ikan. Budi daya laut yang terdiri dari kerapu, kakap, dan kerang hijau, budi daya air tawar yaitu mas, nila, lele, patin, gurame, *grass carp*, lobster air tawar, bawal tawar, dan ikan hias, Budi daya tambak yaitu rumput laut, udang vaname, udang windu, kerapu, kakap, bandeng, sedangkan budi daya perairan umum yaitu mas, nila, dll.

2. Bidang Pertanian

Potensi pertanian di Provinsi Sumatera Utara sangat menjanjikan. Hal ini terlihat dari nilai ekspor komoditas pertanian Provinsi Sumatera Utara yang menempati peringkat pertama se-Indonesia dengan total nilai ekspor mencapai 27 triliun di sepanjang Tahun 2021. Tahun 2022, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara tetap menjadikan pembangunan pertanian (pangan) sebagai prioritas Pemerintah Provinsi dalam hal meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini dikarenakan sektor ini termasuk ke dalam sektor yang dinilai mampu bertahan di tengah pailitnya ekonomi global saat pandemi Covid-19 melanda dunia.

Provinsi Sumatera Utara dikenal karena luas perkebunannya dan hingga saat ini perkebunan tetap menjadi primadona perekonomian daerahnya. Adapun komoditas perkebunan yang diproduksi di Provinsi Sumatera Utara adalah karet, coklat, teh, kelapa sawit, kopi, cengkeh, kelapa, kayu manis, dan tembakau. Disamping itu, komoditas hortikultura juga dikenal mendukung perekonomian Provinsi Sumatera Utara. Adapun komoditas yang dihasilkan antara lain, jeruk medan, jambu Deli, sayur kol, tomat, kentang, dan wortel.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Tahun 2022 menargetkan memproduksi padi sebanyak 3,98 juta ton GKG atau lebih tinggi dari Tahun 2021 (3,9 juta ton GKG). Perkiraan kenaikan produksi padi didukung kenaikan produktivitas tanaman padi dan karena luasan lahan bisa ditingkatkan di Provinsi Sumatera Utara. Sentra pertanaman padi di Sumatera Utara berada di Kabupaten Simalungun, Serdang Bedagai, Langkat, dan Kabupaten Mandailing Natal.

3. Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, luas ekosistem mangrove di Indonesia mencapai 3,63 juta hektare (ha) atau 20,37% dari total luas dunia, sebaran mangrove Indonesia tersebar di berbagai wilayah Indonesia salah satunya adalah pulau Sumatera yang memiliki kurang lebih 666,439 hektare. Ekosistem mangrove selain berfungsi ekologis sebagaimana hutan di daratan, mangrove memiliki keistimewaan lain karena mangrove merupakan sumber daya lahan basah pada wilayah

pesisir, sistem penyangga kehidupan dan kekayaan alam yang nilainya sangat tinggi. Ekosistem mangrove merupakan bagian integral dari pengelolaan wilayah pesisir yang terpadu dengan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan sering dianggap sebagai suatu ekosistem yang spesifik dan mempunyai ciri-ciri khusus, baik dari segi iklim, formasi tumbuhan, maupun faktor edafis (tanah), serta memiliki kekayaan yang tak ternilai harganya. Namun kondisi mangrove Indonesia banyak mengalami kerusakan baik akibat aktivitas manusia maupun bencana alam.

C. HASIL KUNJUNGAN KERJA

1. Kunjungan ke Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan

a. Gambaran Umum

Sekilas sejarah kepemilikan PPS Belawan berdasarkan Kepmen Perhubungan tanggal 25 Desember 1975 Nomor: P B/W 30/13/75 ditetapkan Gabion-Belawan sebagai lokasi khusus bagi kapal-kapal perikanan. Pada Januari 1978 terjadi penyerahan pengelolaan Gabion-Belawan dari Departemen Perhubungan kepada Departemen Pertanian, kemudian pada Mei 1978 berdasarkan Kepmen Pertanian Nomor: 310 Tahun 1978 Pelabuhan Perikanan Belawan diresmikan sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara Belawan. Pada tahun 2000 terjadi penyerahan pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Belawan dari Departemen Pertanian kepada Departemen Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya tanggal 1 Mei 2001 berdasarkan Kepmen Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.26.I/MEN/2001 Pelabuhan Perikanan Nusantara Belawan mengalami peningkatan status kelembagaan menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan dengan potensi geografis terletak diantara perairan Pantai Timur Sumatera (Selat Malaka), Laut Cina Selatan dan Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang berada pada WPP-RI 571.

Kemudian berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2013, terjadi peralihan kewenangan pengelolaan Pelabuhan Perikanan Belawan dimana Perum Perindo mendapatkan tugas dan tanggung mengelola aset negara dalam rangka pelayanan barang jasa dan pengembangan sistem bisnis perikanan ke masyarakat untuk mencari profit di 6

pelabuhan perikanan yaitu PPS Nizam Zachman Jakarta; PPS Belawan; PPN Pekalongan; PPN Brondong; PPN Pemangkat Kab. Sambas, dan PPN Prigi Kab. Trenggalek. Selain itu, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 759/KMK/ 0.13/1992 pengelolaan dan pelayanannya ditambah 3 pelabuhan lainnya yaitu Pelabuhan Perikanan Lampulo di Banda Aceh, Pelabuhan Perikanan Tarakan, dan Pelabuhan Perikanan Banjarmasin.

Kegiatan Perum Perikanan Indonesia terus berkembang menjadi salah satu perusahaan perikanan terkemuka dengan fokus pada tiga lini usaha, yaitu, jasa pelabuhan (sewa lahan dan bangunan; tambat labuh; jasa *docking* dan perbaikan kapal; sewa *cold storage*; produksi es; penjualan BBM, air bersih dan perbekalan kapal lainnya); budi daya (ikan dan udang, termasuk produksi pakan ikan dan udang), serta perdagangan dan pengolahan ikan dan hasil laut, baik untuk konsumsi dalam negeri maupun ekspor.

b. Pointer Dirjen Perikanan Tangkap

1) Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan diproyeksi terbesar ke 2 setelah Pelabuhan Perikanan Muara Baru Jakarta.

2) Beberapa Permasalahan yang ada di PPS Belawan, antara lain:

a) Aset lahan saat ini merupakan milik PT Perindo.

b) Adanya tumpang tindih sistem pengelolaan pelabuhan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan PT Perindo selaku BUMN sehingga pelayanan kurang optimal karena disinyalir hanya memungut sewa tempat tanpa mempertimbangkan roadmap pelabuhan dan tanpa ada perbaikan sarpras yang signifikan.

c) Terjadinya Banjir saat pasang atau musim tertentu.



d) Kementerian Kelautan dan Perikanan berharap aset PPS Belawan dapat dikembalikan pengelolaannya.

- e) Pengembangan ke depan KKP mendapat bantuan pinjaman PHLN dari AFD Perancis untuk mengembangkan PPS Belawan di lahan baru seluas sekitar 28 ha.
 - f) Mitra usaha di PPS Belawan sekitar 30 perusahaan ikan yang selama ini melakukan swadaya terhadap peningkatan sarpras.
 - g) Kapal perikanan yang ada di PPS Belawan didominasi oleh kapal berukuran di atas 30 GT.
 - h) Wilayah distribusi ikan hingga ke Sumatera Selatan.
 - i) Menindaklanjuti UU Cipta Kerja, KKP berencana melakukan pengukuran ulang kapal perikanan di seluruh Indonesia.
 - j) Terkait alat penangkap ikan Pukat Hela Ikan tarik berkantong di PPS Belawan sudah dilarang dan nelayan diarahkan mengganti alat tangkapnya dengan pukat hela yang mata jaringnya lebih besar dan ramah lingkungan.
- c. Pointer Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan
- 1) Maksud dan tujuan PPS Belawan
 - a) Maksudnya adalah melakukan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan untuk mewujudkan pelabuhan perikanan yang ramah lingkungan (*eco fishing port*) dalam melayani nelayan dan stakeholder lainnya di pelabuhan perikanan.
 - b) Tujuannya diantaranya:
 - ✓ Mengetahui skala prioritas dan kelayakan program peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan dalam menunjang kegiatan usaha perikanan tangkap bagi nelayan dan stakeholder lainnya di pelabuhan perikanan.
 - ✓ Mempertahankan mutu dan nilai tambah ikan hasil tangkapan dengan menerapkan standar internasional mutu pelayanan dan lingkungan (ISO).
 - ✓ Meningkatkan devisa negara akibat dampak ekonomi yang ditimbulkan (manfaat ekonomi langsung).
 - ✓ Meningkatkan pendapatan para pelaku usaha perikanan tangkap di pelabuhan perikanan.

2) Data kapal perikanan aktif berpangkalan di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan:

JENIS KAPAL PERIKANAN	UKURAN KAPAL								JUMLAH
	<=5	6-10	11-20	21-30	31-60	61-100	101-150	>150	
Bouke Ami	1	0	0	75	0	2	0	0	78
Bubu	10	4	0	0	0	0	0	0	14
Cast Net	0	0	0	0	2	4	0	0	6
Jaring insang	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Pancing	10	58	97	24	0	0	0	0	189
Pancing cumi	3	4	16	26	0	0	0	0	49
PSPB	0	0	0	0	0	0	11	0	11
PSPK	0	5	12	62	47	56	19	10	211
TOTAL	27	75	128	187	49	62	20	10	559

3) Kondisi Fasilitas Pelabuhan

NO	JENIS FASILITAS	VOLUME	KONDISI	KETERANGAN
1	Dermaga	(153,6 m x 8 m) 1228,8 m ²	Rusak	Perlu Ditinggikan
2	Jetty	(48 m X 7 m) 1008 m ²	Rusak	Perlu Ditinggikan
3	Lahan	6,7 Ha	Rawa	Hasil Pembebasan Lahan sudah diserifikat
5	Drainase	1.489 m ²	Rusak	Perlu Pemeliharaan dan diperlebar
6	Jalan utama	(4.837 m x 9 m) 43540 m ²	Sebagian Besar masih Tanah	Perlu peninggian dan di Beton
7	Alur Pelayaran	1500 m ²	Dangkal	perlu pengerukkan

4) Kondisi Jalan Utama



Foto. Kondisi jalan belum seluruhnya dilakukan penegerasan kondisinya sangat memprihatinkan Perlu peninggian dan pengerasan

5) Jenis ikan yang dominan didaratkan

Produksi ikan di PPS Belawan merupakan hasil tangkapan kapal perikanan yang berpangkalan di PPS Belawan. Produksi ikan sesuai dengan jenis alat tangkap yang dominan yaitu (*Purse Seine, Bouke Ami, Cast Net*), Bubu, Pukat hela sehingga jenis ikan yang dominan didaratkan adalah jenis ikan pelagis kecil seperti Ikan Layang), Tembang, Selar Kuning, dan Layang, Berdasarkan alat tangkap lainnya menghasilkan ikan tangkapan seperti, ikan demersal (Bawal, Ikan Kerapu Kakap, Kuwe), dan Cumi-Cumi (*Loligo Spp.*).

6) Produksi dan Nilai Produksi

BULAN	2019		2020		2021	
	PRODUKSI (KG)	NILAI PRODUKSI (Rp.)	PRODUKSI (KG)	NILAI PRODUKSI (Rp.)	PRODUKSI (KG)	NILAI PRODUKSI (Rp.)
Januari	1.044.046	31.163.735.069	1.327.804	29.024.628.000	1.330.372	40.691.060.000
Februari	1.084.333	31.862.697.667	1.244.753	27.032.613.000	1.312.486	37.648.825.000
Maret	1.519.092	41.148.592.789	1.106.794	23.669.555.000	1.647.031	43.289.823.000
April	1.553.589	44.715.931.866	1.423.641	27.830.275.400	1.441.522	38.033.220.000
Mei	1.516.791	43.537.366.377	1.591.523	33.816.736.000	1.268.968	39.305.634.000
Juni	1.265.541	36.250.586.987	1.812.474	37.499.566.000	1.221.713	39.423.745.000
Juli	1.627.455	48.114.678.381	1.878.183	38.754.941.000	1.826.700	70.870.466.165
Agustus	1.638.311	49.916.263.242	1.828.875	40.656.418.000	1.866.065	73.948.946.101
September	2.100.370	64.677.653.560	1.937.833	42.006.832.000	2.043.627	81.213.853.095
Oktober	3.123.975	57.157.481.432	1.721.894	38.106.593.000	1.864.892	70.034.437.530
November	2.852.820	51.836.515.319	1.722.717	40.086.606.000	1.696.281	76.204.024.867
Desember	2.526.888	40.430.208.076	1.347.650	36.558.650.000	1.489.188	68.425.909.451
TOTAL	21.853.211	540.811.710.765	18.944.141	415.043.413.400	19.008.845	679.089.944.209

7) Jenis investasi yang ada saat ini

- APMS/SPDN – 8 Unit
- UPI/Cold Storage – 28 Unit
- Pabrik Es – 6 Unit
- Bengkel – 9 Unit
- Kios Waserda – 28 Unit
- Toko Bahan Alat Perikanan (BAP) -12 Unit
- Docking – 2 unit
- Kapal Perikanan – 559 unit

8) Jenis investasi yang ada saat ini

- PEMERINTAH** → Sampai tahun 2021 sebesar **Rp. 146,500 M**
- PERUM** → Sampai tahun 2014 sebesar **Rp. 30,00 M**
- SWASTA** → Sampai dengan tahun 2021 sebesar **Rp. 2.497,5 T (Sarana & Prasarana)**
- PEREDARAN UANG PER HARI** → **Rp. 7,942 M/hari**
- PENYERAPAN TENAGA KERJA** → **13.037 ORANG**

d. Aspirasi/Masukan Masyarakat

- 1) PPS Belawan sampai sekarang ini belum dikemas dengan baik bagi kebutuhan saat ini maupun yang akan datang, Master Plan yang pernah dibuat, sampai saat ini belum terlaksana seluruhnya, bahkan baru sebagian kecil yang telah dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh minimnya pendanaan pembangunan fasilitas

pelabuhan perikanan yang dialokasikan oleh Pemerintah. Seperti dermaga panjangnya yang masih belum mencukupi untuk pelabuhan perikanan kelas samudera (existing: p=154 m), mengingat kapal-kapal yang membongkar hasil tangkapannya cukup banyak jumlahnya per hari sehingga tidak mencukupi untuk operasional, demikian juga kondisi kedalaman kolam dangkal pelabuhan sangat dangkal antara 0,5 s/d 1 m, sehingga sangat mengganggu aktivitas keluar masuk kapal perikanan.

- 2) Harapan PPS Belawan, antara lain:
 - a) Menyediakan prasarana pelabuhan perikanan yang memadai karena salah satu kebutuhan mutlak yang diperlukan untuk meningkatkan operasional pelabuhan serta memajukan kegiatan industri perikanan dalam rangka menunjang sepenuhnya terhadap kegiatan/pelayanan operasional pelabuhan.
 - b) Rehabilitasi/pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan dengan cara melakukan penataan fasilitasnya dalam rangka menjawab tantangan dalam pengembangan pelabuhan perikanan pada masa yang akan datang.
 - c) Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan menjadi *eco fishing port* yang berwawasan lingkungan.
- 3) HNSI meminta kepada PT Perindo melaksanakan perbaikan sarana prasarana kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan dan orientasinya tidak memikirkan keuntungan semata dari hasil sewa lahan yang tinggi dan retribusi pungutan PBB perairan yang dipertanyakan.
- 4) HNSI meminta adanya pembangunan rumpon sebagai batas wilayah perairan Indonesia dengan negara Malaysia agar nelayan tidak melewati batas dan dapat memastikan tidak melewati jalur perairan negara lain.
- 5) Nelayan Puersine meminta agar PP 85 tahun 2021 untuk direvisi pungutannya karena dianggap terlalu besar yang berakibat menurunnya penghasilan nelayan.

- 6) KNTI meminta kebijakan penangkapan terukur berpihak ke nelayan tradisional dan membenahi ketersediaan BBM bersubsidi yang masih kurang/langka.

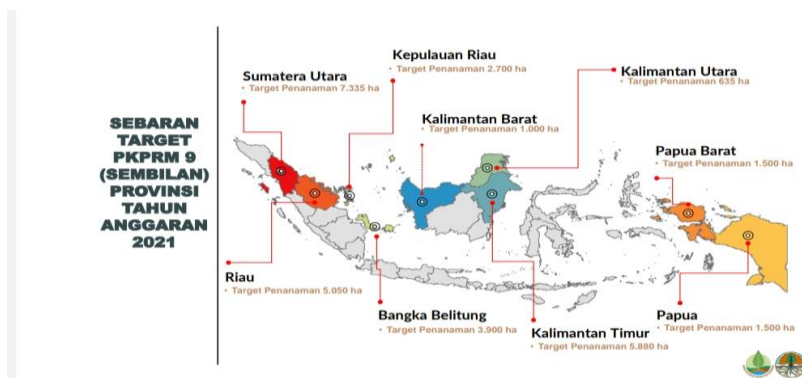
2. Kunjungan Kerja ke Areal Fasilitasi Padat Karya Percepatan Rehabilitasi Mangrove (PKPRM) Kelompok Budi Daya Khazanah Mangrove Desa Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan

- a. Paparan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - 1) Fasilitasi Percepatan Restorasi Gambut dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Areal Kerja Restorasi di 7 (tujuh) Provinsi seluas 1.200.000 hektar.
 - 2) Percepatan Rehabilitasi Mangrove pada areal kerja di 9 (sembilan) Provinsi seluas 600.000 hektar.

Target Fisik PKPRM Tahun 2021



Sebaran Target di 9 Provinsi Tahun 2021



Realisasi tahun 2021 seluas 34.912 hektar atau sebesar 105,79% dari total target penanaman seluas 33.000 hektar.

b. Fasilitas Padat Karya Percepatan Rehabilitasi Mangrove di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021.

PKPRM Sumatera Utara memiliki lokasi penanaman total seluas 7.559 Hektar yang tersebar di 2 (dua) UPT KLHK pada 8 (delapan) kabupaten, 27 kecamatan, dan 54 desa. Kebutuhan bibit/propagul sebanyak 22.688.300 batang dengan kebutuhan tenaga kerja Penanaman melibatkan sebanyak 6.828 orang dan jumlah tenaga kerja yang dikeluarkan sebanyak 431.766 Hari Orang Kerja (HOK). Dengan keterlibatan kelompok sebanyak 138 kelompok terlibat dalam kegiatan PKPRM yang tersebar di beberapa Kabupaten Provinsi Sumatera Utara, adalah:

1) PKPRM Kabupaten Langkat

Luas penanaman 2.432 hektar dengan jumlah bibit 7.321.700 batang, dilaksanakan oleh 24 kelompok dengan jumlah tenaga kerja 1.803 orang.

2) PKPRM Kota Medan

Luas penanaman 228 hektar dengan jumlah bibit 281.600 batang, dilaksanakan oleh 5 (lima) kelompok dengan jumlah tenaga kerja 134 orang.

3) PKPRM Kabupaten Batubara

Luas penanaman 155 hektar dengan jumlah bibit 976.000 batang, dilaksanakan oleh 4 (empat) kelompok dengan jumlah tenaga kerja 206 orang.

4) PKPRM Kabupaten Deli serdang

Luas penanaman 726 hektar dengan jumlah bibit 2.348.100 batang, dilaksanakan oleh 17 kelompok dengan jumlah tenaga kerja 721 orang.

5) PKPRM Kabupaten Labuhanbatu Utara

Luas penanaman 2.220 hektar dengan jumlah bibit 7.114.200 batang, dilaksanakan oleh 65 kelompok dengan jumlah tenaga kerja 2.471 orang.

6) PKPRM Kabupaten Asahan
Luas penanaman 1.158 hektar dengan jumlah bibit 2.766.700 batang, dilaksanakan oleh 15 kelompok dengan jumlah tenaga kerja 865 orang.

7) PKPRM Kabupaten Tapanuli Tengah
Luas penanaman 297 hektar dengan jumlah bibit 851.000 batang, dilaksanakan oleh 3 (tiga) kelompok dengan jumlah tenaga kerja 329 orang.

8) PKPRM Kabupaten Mandailing Natal.
Luas penanaman 343 hektar dengan jumlah bibit 1.029.000 batang, dilaksanakan oleh 5 (lima) kelompok dengan jumlah tenaga kerja 299 orang.

c. Pembangunan Areal Produksi Bibit (APB), Lokasi, & Jumlah

Jumlah areal produksi bibit sebanyak 50 unit APB yang tersebar di 7 (tujuh) kabupaten yang dibangun oleh 50 kelompok & hok dengan melibatkan 2.333 tenaga kerja dan hok sebanyak 9.184 hok, dengan bibit yang dihasilkan sebanyak 1.1300.000 batang bibit bakau (*rhizophora sp*).

No.	Nama Kelompok	Desa	Kecamatan	Kabupaten
1	KTH Selay	Desa Baga	Muhuta Tengah	Barubun
2	KTH Selay	Desa Baga	Muhuta Tengah	Barubun
3	KTH Selay	Desa Baga	Muhuta Tengah	Barubun
4	KTH Selay	Desa Baga	Muhuta Tengah	Barubun
5	KTH Selay	Desa Baga	Muhuta Tengah	Barubun
6	KTH Selay	Desa Baga	Muhuta Tengah	Barubun
7	KTH Selay	Desa Baga	Muhuta Tengah	Barubun
8	KTH Selay	Desa Baga	Muhuta Tengah	Barubun
9	KTH Selay	Desa Baga	Muhuta Tengah	Barubun
10	KTH Selay	Desa Baga	Muhuta Tengah	Barubun
11	KTH Selay	Desa Baga	Muhuta Tengah	Barubun
12	KTH Selay	Desa Baga	Muhuta Tengah	Barubun
13	KTH Selay	Desa Baga	Muhuta Tengah	Barubun
14	KTH Selay	Desa Baga	Muhuta Tengah	Barubun
15	KTH Selay	Desa Baga	Muhuta Tengah	Barubun
16	KTH Selay	Desa Baga	Muhuta Tengah	Barubun
17	KTH Selay	Desa Baga	Muhuta Tengah	Barubun
18	KTH Selay	Desa Baga	Muhuta Tengah	Barubun
19	KTH Selay	Desa Baga	Muhuta Tengah	Barubun
20	KTH Selay	Desa Baga	Muhuta Tengah	Barubun
21	KTH Selay	Desa Baga	Muhuta Tengah	Barubun
22	KTH Selay	Desa Baga	Muhuta Tengah	Barubun
23	KTH Selay	Desa Baga	Muhuta Tengah	Barubun
24	KTH Selay	Desa Baga	Muhuta Tengah	Barubun

d. Aspirasi/Masyarakat Kelompok Budi Daya Khazanah Mangrove Desa Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan:

1) Kelompok Budi Daya Khazanah Mangrove memiliki luas penanaman seluas 48 hektar pola tanam *sylvofishery* & pengayaan

jumlah bibit 59.400 batang jumlah anggota & hok 30 anggota & 1.620 HOK.

Kabupaten/Kota	: Medan
Kecamatan	: Medan Labuhan
Desa/Kelurahan	: Nelayan Indah
Fungsi Kawasan	: Areal Penggunaan Lain
Kelompok Pelaksana	: Kelompok Khazanah Mangrove
Jenis Tanaman	: Rhizophora. Sp
Pola	: Silvofishery (1,600 Btg/Ha), 19 Ha : Pengkayaan (1,000 Btg/Ha), 29 Ha
Luas	: 48 Ha
Jumlah Orang Terlibat	: 30 Orang
Hok Terserap	: 1,620 HOK
Jumlah Bibit	: 59,400 Batang

- 2) Lokasi penanaman mangrove di Kelurahan Nelayan Indah, kondisi awal tahun 70-an merupakan Kawasan Hutan pesisir dengan dominasi tanaman mangrove.
- 3) Selanjutnya terjadi kerusakan (penebangan liar untuk arang) berlanjut pada tahun 90-an marak dengan penjarahan sehingga merubah fungsi hutan menjadi tambak intensif yang di kelola oleh masyarakat.
- 4) Kondisi saat ini tambak tersebut tidak berfungsi lagi (produksinya menurun dan irigasinya tambak rusak), dan muncul kesadaran masyarakat untuk menghidupkan kembali lahan desanya dengan cara menanam mangrove dan berlanjut menjadi sasaran Kegiatan Padat Karya Penanaman Mangrove Tahun 2021.
- 5) Kelompok Khazanah Mangrove mengharapkan adanya perbaikan saluran air pasang surut di areal tanam mangrove.

- 6) Meminta dilakukan perbaikan jalan sebagai akses menuju lokasi penanaman mangrove.
- 7) Kelompok berharap adanya anggaran pemeliharaan pascatanam karena dibutuhkan biaya perawatan agar mangrove bisa tumbuh dengan baik.
- 8) Proses penanaman hingga selesai dibutuhkan waktu selama 2 bulan.
- 9) Upah yang diterima masing-masing anggota kelompok sebesar Rp90.000/perorang. Semua dana penanaman masuk melalui rekening kelompok.

3. Kunjungan ke Lokasi BPTP

a. Gambaran Umum

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Utara adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 798/Kpts/OT.210/12/94 tanggal 13 Desember 1994 yang memiliki tugas dalam melaksanakan penelitian, pengkajian, pengembangan, dan diseminasi inovasi pertanian spesifik lokasi Sumatera Utara.

BPTP Sumatera Utara memiliki Tupoksi:

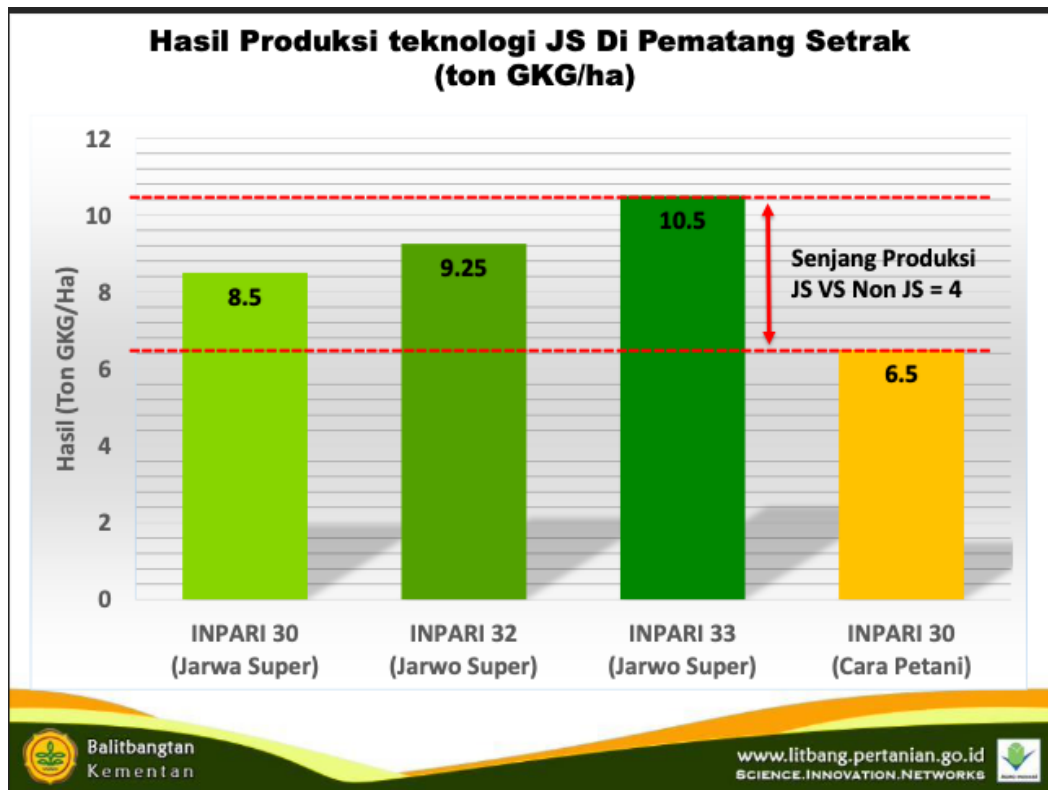
- 1) Inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
- 2) Penelitian, pengkajian, dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
- 3) Pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan materi penyuluhan,
- 4) Menyiapkan kerja sama, informasi, dokumentasi serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
- 5) Pelayanan teknik kegiatan pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi, serta
- 6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Pada Tahun 2019 BPTP telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya:

- 1) Mandatori: UPSUS Pajale Plus, Pendampingan Kawasan, UPBS (Padi, Kedelai), Bioindustri (Nias dan Pakpak Bharat), Taman Agroinovasi, SDG, Optimalisasi Sumber Air, Mandiri Benih, KATAM, PUAP, dan UAPPA B/W;
- 2) *In House*: Perakitan teknologi padi, pascapanen cabe, pengembangan padi gogo lokal, optimalisasi lahan suboptimal untuk pangan dan kebun, pemetaan, dan anjak;
- 3) Diseminasi: Publikasi dan diseminasi, pameran, peningkatan komunikasi penyuluh, pelepasan Sigambiri sebagai VU Nasional; serta
- 4) SMARTD: TSS, Reklamasi lahan, Jarwo Super, dan infrastruktur.

Jarwo Super

Teknologi Jajar Legowo Super yang dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian dilakukan melalui penelitian dan pengkajian di berbagai lokasi di Indonesia. Khusus untuk Provinsi Sumatera Utara, telah dilakukan pemanenan dengan menggunakan *Combine Harvester* dengan *lossing* <2%. BPTP melakukan penanaman di beberapa lokasi (Tahun 2017 total luas penanaman sebesar 1000 Ha) yaitu Langkat (200 Ha, 11 Poktan), Deli Serdang (200 Ha, 6 Poktan), Tap Selatan (50 Ha, 1 Poktan), Batubara (150 Ha, 7 Poktan), Labuhan Batu (200 Ha, 8 Poktan), dan Asahan (200 Ha, 8 Poktan). Berdasarkan hasil penanaman yang dibedakan sesuai dengan varietas, menggunakan Inpari 33 dengan metode Jarwo Super menghasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan varietas dan metode lainnya.



Disamping itu, BPTP telah melakukan berbagai penelitian untuk peningkatan produktivitas padi, jagung, kedelai, hortikultura, dan merekomendasikan beberapa metode, diantaranya:

- 1) Teknologi Largo Super (Padi Gogo di Lahan Kering) dengan varietas VUB Inpago, pupuk berimbang, kapur dolomit, pupuk organik, pengendalian OPT, dan tanam larikan. Produksi yang dihasilkan sekitar 5-7 ton/ha.
- 2) Teknologi RAISA (Padi Pasang Surut) dengan varietas VUB Inpara, pupuk berimbang, pengendalian OPT, tanam jarwo 2:1. Produksi yang dihasilkan 6-8 ton/ha.
- 3) Teknologi padi pada lahan tadah hujan dengan varietas VUB tahan kering, pupuk berimbang, pengendalian OPT. Produksi yang dihasilkan 6-7,89 ton/ha.
- 4) Teknologi PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu) jagung dengan varietas VUB Nasa, Bima, pupuk berimbang, jarak tanam 20x50 cm, pengendalian OPT. Produksi yang dihasilkan > 12 ton/ha pipilan kering.
- 5) Teknologi PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu) kedelai dengan varietas VUB Anjasmoro, Kaba, Panderman, pupuk berimbang,

pengendalian OPT, jarak tanam 25X50 cm. Produksi yang dihasilkan 2-3 ton/ha.

- 6) Teknologi produksi benih bawang merah TSS (*True of Sallot Seed*) menghasilkan benih TSS dengan produktivitas 100-300 kg/ha dengan mutu (DB) >70% di KP Gurgur. Komponen teknologinya yaitu benih umbi (masak fisiologis dan berukuran besar), vernalisasi 2 minggu, penggunaan BAP dan aplikasi Boron, penggunaan polinator, dan alsintan.
- 7) Teknologi Proliga Bawang merah dengan menggunakan Benih TSS, jarak tanam 10x10 cm, pupuk berimbang, pengendalian OPT, memproduksi 40-48 ton/ha.
- 8) Teknologi Proliga Cabe Merah dengan menggunakan Varietas Kencana, Lingga, pupuk berimbang, jarak tanam 40X60 cm, pengendalian OPT, memakai mulsa plastik perak. Produksinya menghasilkan 25-29 ton/ha.
- 9) Teknologi Proliga Kentang dengan menggunakan varietas VUB Granola, Median, benih bermutu, pupuk berimbang, pengendalian OPT, jarak tanam 30X80 cm. Menghasilkan >35 ton/ha.
- 10) Kajian pada tanaman jagung, bawang prei, dan kubis. BPTP merekomendasikan untuk pemberian pukan (3-5 ton/ha), pemberian dolomit (1-2 ton/ha), pemberian pupuk berimbang, penyemprotan basah atau angin untuk membuang abu pada daun tanaman.
- 11) Kajian dampak air pasang di Pulau Kampai dengan merekomendasikan pemberian varietas Inpara, pupuk berimbang, pengendalian OPT, tanam jajar legowo 2:1.

BPTP juga membangun model kawasan rumah pangan lestari (M-KRPL). Terdapat dua jenis M-KRPL yang diaplikasikan di beberapa wilayah diantaranya:

- 1) M-KRPL Perkotaan. Terdapat dua pengelompokan lahan pekarangan yaitu pekarangan tanpa halaman sampai <100 m² (strata sempit) dan Pekarangan dengan halaman 100-200 m² (strata sedang-luas).

2) M-KRPL Pedesaan. Terdapat 4 pengelompokan lahan pekarangan yaitu 1) pekarangan tanpa halaman (strata sangat sempit), pekarangan dengan halaman <120m² (strata sempit), pekarangan dengan halaman 120-400 m² (strata sedang), serta pekarangan dengan halaman >400m² (strata luas).

b. Aspirasi BPTP

BPTP dibangun pada Tahun 1994. BPTP merupakan salah satu dari 65 Satker Pertanian di bawah Balitbangtan. BPTP memiliki 1,8 ha taman inovasi. BPTP Sumatera Utara memiliki 2 kebun menghasilkan benih padi dan memenuhi kebutuhan di Sumatera Utara. Di Toba, BPTP membangun pusat perbenihan hortikultura yaitu bawang merah, bawang putih, kentang, dan kopi. Pada Tahun 2020, BPTP mendapatkan mandat untuk mendukung program *Food Estate* Humbang Hasundutan dengan produksi benih bawang merah, bawang putih, dan kentang (yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan di Sumatera Utara).

Tahun 2020, sistem integrasi ternak sapi dan padi sangat berdampak positif bagi masyarakat karena berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dimana limbah sapi bisa dimanfaatkan kembali untuk padi, dan jeram padi bisa dimanfaatkan untuk ternak sapi. Hasil beberapa penelitian untuk pengurangan masalah anak-anak stunting yang diharapkan bisa menjadi baik, salah satunya dengan mengkonsumsi nasi dari beras varietas Inpari Nutrizink.

BPTP memiliki produksi padi dan harus dikombinasi dengan Jarwo Super yang bisa meningkatkan produksi hingga 11-12 ton/ha dan sudah dibuktikan di semua kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. BPTP juga memiliki beberapa teknologi seperti Jarwo Super dll dan juga mengembangkan jagung dan kedelai.

Saat ini petani membutuhkan benih dalam jumlah yang banyak dan Tahun ini BPTP mendapatkan dana yang cukup besar untuk membangun pusat perbenihan hortikultura, sarana produksi, kultur jaringan, dan akan menjadikan pusat edukasi teknologi, pusat perbenihan hortikultura modern.

c. Tanggapan Komisi IV DPR RI

Komisi IV DPR RI mendukung BPTP untuk mengembangkan dan mengaplikasikan teknologi pertanian. Komisi IV DPR RI menyikapi BPTP sebagai indikator pertanian nasional dan pengembangan penelitiannya diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani. Komisi IV DPR RI juga mendukung BPTP Sumatera Utara untuk menjadi *showcase* yang dapat dibawa ke daerah lain.

4. Kunjungan ke Lokasi Bulog

a. Gambaran Umum

Total penggunaan CBP (Cadangan Beras Pemerintah) di kantor Wilayah Sumatera Utara s.d. 17 Februari 2022 sebanyak 2.927 ton. Adapun penggunaan CBP digunakan untuk kegiatan KPSH (Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga) sebesar 2.897 ton, Bencana Alam sebesar 17,5 ton, dan Golongan Anggaran 12,5 ton. Perum Bulog Wilayah Sumatera Utara Tahun 2021 telah merealisasikan pengadaan beras sebesar 82,11% atau senilai 22.579 ton dari 27.500 ton. Per 17 Februari 2022, Perum Bulog baru merealisasikan pengadaan penyerapan 2,68% atau 20.820 ton.

b. Aspirasi Perum Bulog dan Pupuk Indonesia

Gudang yang dikunjungi tidak penuh dan kapasitasnya sebesar 21 ribu ton. Saat ini persediaan beras di gudang bulog hanya mencapai 1000 ton karena pada Tahun ini Perum Bulog mendapatkan penugasan (sesuai arahan Rakortas) untuk menyimpan beras sebesar 1 juta ton seluruh Indonesia (sesuai kebutuhan sementara kapasitas gudang yang dimiliki Perum Bulog untuk seluruh Indonesia sebesar 4 juta ton). Disamping itu Perum Bulog mengharapkan dukungan dari Komisi IV DPR RI untuk mendapatkan outlet yang dapat menyerap beras petani. Tahun lalu, Perum Bulog hanya menyerap 1,2 juta ton karena untuk menyimpan stok cadangan beras Pemerintah. Beras yang disimpan di gudang Sumatera Utara berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan dan NTB. Provinsi Sumatera Utara menghasilkan (baru menyerap 700 ton)

tetapi karena Sulawesi Selatan dan NTB produksinya *oversupply* maka dialihkan ke gudang Seluruh Indonesia.

Beras untuk CBP tidak bisa dijual kecuali untuk 3 aktivitas yaitu ijin dari Kemendag untuk Operasi Pasar/KPSH, ijin dari Kemensos untuk Bencana Alam, serta untuk golongan anggaran. Oleh karena itu, jika outletnya hanya itu, beras akan tersimpan lama dan beresiko untuk dilakukan disposal stok, karena sesuai dengan Permentan, beras yang disimpan oleh Perum Bulog maksimal 4 bulan dan setelahnya harus dilakukan disposal. Oleh karena itu, Perum Bulog membutuhkan metode *revolving stock*.

Bantuan sosial ada 3 program yaitu program BPNT, program PKH, dan Program BST. Untuk program BPNT seluruhnya boleh mengambil beras dimana saja dan bisa diberikan secara tunai. Kementerian Sosial juga telah mengeluarkan surat untuk memberikan bantuan pangan non tunai secara tunai dan tidak ada penugasan langsung kepada perum bulog.

Pemerintah memiliki hutang kepada Perum Bulog hampir sebesar Rp5 triliun dan dari Rp3,5-4 triliunnya merupakan hutang Pemerintah untuk program PPKM dan hingga hari ini belum dibayar Pemerintah (jika ingin dibayar maka Kemensos harus merubah Permensos).

Terkait komoditas minyak goreng, Perum Bulog belum mendapatkan penugasan untuk stabilisasi harga dan stok sehingga konsep penjualan Perum Bulog menggunakan B2B (Medan hanya memiliki stok 5000 liter).

Dari 1 juta ton yang dimiliki oleh Bulog (stok), stok impor Tahun 2018 masih ada 160 ribu ton. Perum Bulog sudah membuat surat untuk meminta petunjuk untuk dilelang dan tidak ada jawaban dari beras itu. Kondisinya sudah turun mutu dan tinggi susutnya. Disamping itu, beras tersebut tidak layak dikonsumsi. Untuk saat ini Perum Bulog terpaksa membiarkannya karena jika dijual maka disurati Kemendag karena beras tersebut merupakan beras penugasan.

Kapasitas gudang yang ada di Provinsi Sumatera Utara sebesar 81 ribu ton tetapi isinya hanya 9000 ton karena target pengadaan hanya 26 ribu ton dan Perum Bulog tidak berani mengambil banyak karena

dikhawatirkan busuk (karena tidak ada hilir penyaluran beras). Untuk Seluruh Indonesia, Perum Bulog menargetkan 1,6 juta ton (pengadaan).

Perum Bulog membeli beras dengan meminjam kepada Bank dengan bunga komersil yang nilainya sama dengan meminjam uang kepada Bank. Perum Bulog membayar bunga komersil hingga mencapai 1-1,5 Triliun/tahun (ketika stok masih banyak). Harapan jika Perum Bulog mendapatkan penugasan penyerapan atau impor, Pemerintah juga memberikan dana/modal untuk melaksanakan penugasan tersebut. Disamping itu, saat ini Perum Bulog baru dibayar oleh Pemerintah jika komoditas sudah dijual/keluar.

Pupuk Indonesia

Data yang tercatat, Provinsi Sumatera Utara memiliki alokasi pupuk subsidi sebesar 382.650 ton. Yang sudah tersalurkan per tanggal 17 Februari 2022 sebesar 34 ribu ton (8,9%). Pupuk Indonesia secara gradual akan menyalurkan bulan demi bulan. Data bulan Februari 2022, total pupuk subsidi terdapat 27.194 ton (222% di atas ketentuan minimum). Untuk urea, stok tersedia 10.471 ton (233% di atas ketentuan minimum), stok pupuk NPK sebesar 8.424 ton (242% dari kebutuhan minimum).

Tahun 2022, E-RDCK nasional 25 juta ton, alokasi yang disiapkan Pemerintah sesuai anggaran sebesar 9,1 juta ton sehingga Pemerintah masih belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan petani. Terkait dengan maraknya penyelewengan pupuk bersubsidi, PT Pupuk Indonesia bekerja sama dengan Bareskrim untuk mem-*follow up* (PT Pupuk Indonesia membantu mendokumentasi adanya penyelewengan tersebut dan membantu mengetahui sumber kebocoran pupuk tersebut). Sesuai dengan rekomendasi Komisi IV DPR RI, PT Pupuk Indonesia menindak tegas kios/distributor yang melanggar dengan cara menonaktifkan/dipecat. Diharapkan dengan adanya kebijakan ini, penyelewengan pupuk menjadi berkurang dan Pemerintah bisa meningkatkan alokasi untuk petani.

Saat ini pemeriksaan yang berlangsung sudah dilakukan oleh aparat hukum dan PT Pupuk Indonesia selalu dilibatkan. Upaya PT Pupuk Indonesia untuk mengurangi penyelewengan adalah membuat sistem digitalisasi stok pupuk yang selalu dilaporkan kepada BPK (dari pabrik-lini 2 kabupaten) sehingga diharapkan penelusuran angka penyaluran lebih mudah dan dapat melihat angka yang tidak *balance* tersebut.

Sejak Tahun 2016-awal 2021, ada 95 kasus penyelewengan. Penyelewengan pupuk bersubsidi dilakukan bervariasi dan paling umum adalah menaikkan HET pupuk subsidi. Untuk tindakan penyelewengan, kasus tersebut hanya bisa menangkap sedikit tersangka. Ada beberapa distributor dan kios yang terlibat dan dipecat. Untuk petani, kasusnya baru terungkap di Provinsi Jawa Timur (Tahun 2021) dan pupuk Indonesia tidak bisa menindak tegas (hanya bisa membantu aparat hukum, terkait dengan laporan stok, laporan lainnya). Kasus yang ada saat ini belum tuntas dan masih diproses (masih diusut pengepul pupuk bersubsidi).

PT Pupuk Indonesia sudah bersepakat dengan distributor dan kios terkait dengan kebutuhan petani hanya bisa dipenuhi 35% sehingga harus menyiapkan pupuk nonsubsidi. Hal tersebut merupakan upaya PT Pupuk Indonesia untuk mengatasi kelangkaan pupuk subsidi, namun di lapangan yang terjadi terkadang ada isu pemaketan pupuk subsidi dan non subsidi. Sesuai arahan Komisi IV PT Pupuk Indonesia membuka kios komersil 1000-1500 kios (tahun ini) yang tidak sama dengan pupuk subsidi (untuk menjamin kekurangan pupuk subsidi).

c. Tanggapan Komisi IV DPR RI

Komisi IV DPR RI mendukung Bantuan Sosial menggunakan beras Bulog. Komisi IV DPR RI mendukung untuk menghentikan impor dan memanfaatkan ketersediaan dalam negeri.

Disamping itu, untuk mengatasi fluktuasi harga dan stok minyak goreng, Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk memberikan penugasan kepada Perum Bulog dalam memenuhi ketersediaan minyak goreng dalam negeri.

Komisi IV DPR RI merekomendasikan apabila ada penyelewengan pupuk bersubsidi maka dibutuhkan pidana untuk menjerat kasus tersebut agar ada efek jera. Disamping itu, sanksi tersebut tidak hanya diberlakukan di kios saja melainkan distributornya juga (level atas).

Komisi IV DPR RI merekomendasikan untuk mengatur gudang lini 3 untuk pupuk subsidi dan non subsidi. Perlu ada kebijakan memisahkan penyalur pupuk subsidi dan non subsidi agar tidak ada penyimpangan harga dan penyaluran.

5. Kunjungan ke Lokasi Balai Karantina Pertanian

a. Gambaran Umum

Peran Balai Karantina Pertanian sesuai dengan amanat UU Nomor 21 Tahun 2019 tentang KHIT adalah menjaga dan melindungi kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari ancaman OPTK/HPHK melalui penyelenggaraan perkarantina nasional.

- 1) Sebagai perlindungan penyakit: sistem pencegahan masuk, keluar, dan tersebarnya HPHK dan OPTK.
- 2) Sebagai keamanan/mutu pangan dan pakan: sistem pengawasan dan atau pengendalian terhadap keamanan dan mutu pangan/pakan.
- 3) Sebagai keamanan hayati: Sistem pengawasan dan pengendalian terhadap PRG, SDG, Agensia Hayati, JAI, T/S Liar, T/S Langka.
- 4) Sebagai instrumen perdagangan, SPS-WTO: sistem ekspor-impor komoditas pertanian.
- 5) Sebagai Penegakan hukum: Inteligen-polisi khusus-penyidik PNS.

Di Provinsi Sumatera Utara terdapat 3 lokasi karantina pertanian, yaitu:

- 1) Balai Besar Karantina Pertanian Belawan (Wilker Nias dan Wilker Sibolga).
- 2) Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan (Wilker Bandara Kualanamu; Wilker Cargo; Wilker Bandara Silangit; Wilker Pangkalan Susu; Wilker Kantor Pos Medan; Wilker Kantor Pos Tanjung Morang).
- 3) Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan (Wilker Kuala Tanjung; Wilker Teluk Nibung).

b. Tanggapan Kementerian Pertanian

Sesuai dengan amanah Komisi IV DPR RI tentang karantina, Kementerian Pertanian meminta dukungan Komisi IV DPR RI untuk tetap membangun karantina guna melindungi pertanian nasional.

c. Aspirasi/Masukan Balai Karantina Pertanian

Eksportir yang ingin mengirimkan komoditasnya diwajibkan untuk melakukan pendaftaran online terlebih dahulu dan eksportir bisa mengurus sertifikasi komoditas tersebut melalui online.

Balai Karantina Pertanian Sumatera Utara membangun 2 klinik dan 1 *podcase* yang digunakan untuk mendukung kegiatan ekspor komoditas pertanian, diantaranya:

- 1) Klinik ekspor yang digunakan untuk membedah kepengurusan produk yang akan diekspor.
- 2) Klinik perkarantinaan yang digunakan untuk membina masyarakat terkait dengan syarat sertifikasi komoditas. Balai Karantina memiliki target untuk melindungi sumber daya lokal dari hama penyakit.
- 3) *Podcase* yang digunakan untuk memberikan informasi yang rinci terkait dengan langkah yang dilakukan untuk melakukan ekspor.

Berdasarkan dari data lalu lintas komoditas pertanian, tercatat adanya peningkatan nilai ekspor pertanian di Tahun 2021 sebesar 14,08%, yaitu ekspor sub sektor perkebunan, hortikultura, tanaman pangan, peternakan, dan kehutanan di Tahun 2021 mencapai Rp3,867 Triliun (angka tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian di Tahun 2020 sebesar Rp3,323 Triliun).

d. Tanggapan Komisi IV DPR RI

Komisi IV DPR RI mengapresiasi hadirnya klinik argo ekspor sebagai ruang konsultasi yang dapat mempermudah akses informasi, edukasi bagi para petani, dan pelaku usaha.

IV. KESIMPULAN

1. Komisi IV DPR RI akan mengundang stakeholder terkait melalui rapat gabungan, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, PT Perindo, Kementerian Keuangan, dan BPH Migas untuk mencari solusi dan menjawab berbagai permasalahan yang ada di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, seperti adanya dualisme tata kelola, Kuota BBM subsidi yang masih kurang, retribusi atau PNBP, dan pembentukan kelembagaan melalui BLU.
2. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah Provinsi untuk mampu menjadi fasilitator dan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah pusat dan lembaga dalam rangka tercapainya kesejahteraan nelayan.
3. Komisi IV DPR RI mengapresiasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Badan Restorasi Gambut dan Mangrove serta kelompok masyarakat yang telah bekerja sama melakukan pemulihan mangrove.
4. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) untuk melakukan pembinaan terhadap kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap mangrove.
5. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk menganggarkan biaya pemeliharaan pascapenanaman mangrove agar dapat tumbuh dengan baik.
6. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/BRGM untuk memperhatikan kondisi irigasi dan jalan akses menuju mangrove yang kondisinya rusak.
7. Komisi IV DPR RI mendukung BPTP untuk mengembangkan dan mengaplikasikan teknologi pertanian yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani.
8. Komisi IV DPR RI mendukung agar Pemerintah dalam menjalankan Program Bantuan Sosial menggunakan Beras petani lokal yang diserap oleh Perum Bulog.
9. Komisi IV DPR RI merekomendasikan kepada Pemerintah dan PT Pupuk Indonesia untuk memberikan pidana bagi pelaku yang melakukan penyelewengan pupuk bersubsidi.

10. Komisi IV DPR RI mengapresiasi hadirnya klinik argo ekspor sebagai ruang konsultasi yang dapat mempermudah akses informasi, edukasi bagi para petani, dan pelaku usaha.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi dari beberapa pihak melalui Rapat Kerja atau Rapat Dengar Pendapat bersama Mitra Kerja Komisi IV DPR RI. Semoga kunjungan kerja ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, Februari 2022

Ketua Tim,

Ttd.

Anggia Erma Rini, MKM.

A-41

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan





Areal Penanaman Mangrove



Areal Penanaman Mangrove



Kunjungan ke gudang Perum Bulog



Kunjungan ke gudang Perum Bulog



Kunjungan ke Kantor Kantor Balai Karantina Pertanian Bandara Kualanamu



Kunjungan ke Kantor Kantor Balai Karantina Pertanian Bandara Kualanamu



Kunjungan ke BPTP Sumatera Utara



Kunjungan ke BPTP Sumatera Utara

Mitra Pendamping Kunjungan Kerja

KEMENTERIAN PERTANIAN	Kepala Badan Karantina Pertanian: Ir. Bambang, M.M. Kepala Badan Litbang Pertanian: Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si.
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Direktur Jenderal Perikanan Tangkap: Ir. Muhammad Zaini, M.M.
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1. Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH): Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum. 2. Kepala BRGM: Ir. Hartono, M.Sc.
PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY	1. PIHC (Direktur Portofolio & Pengembangan Usaha): Jamsaton Nababan 2. PIM (Direktur Operasional): Jaka Kirwanto
PERUM BULOG	Direktur Bisnis: Febby Novita

LAMPIRAN MEDIA YANG MELIPUT

1. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37752/t/Dualisme+Pengelolaan+PPS+Belawan+Harus+Segera+Berakhir>
2. <https://m.antaranews.com/amp/berita/2718429/kkp-percepat-pembangunan-pelabuhan-belawan-jadi-eco-fishing-port>
3. <https://www.antaranews.com/berita/2718265/kkp-akselerasi-pembangunan-pps-belawan-jadi-eco-fishing-port>
4. <https://www.beritadaerah.co.id/2022/02/22/kkp-akselerasi-pembangunan-pps-belawan-menjadi-pelabuhan-perikanan-berwawasan-lingkungan/>
5. <https://sumut.voi.id/berita/137722/pelabuhan-perikanan-samudera-belawan-akan-dipercepat-pembangunannya-oleh-menteri-kkp>
6. <https://forumterkininews.id/dualisme-pengelolaan-pps-belawan-harus-berakhir/>
7. <https://www.suaratani.com/2022/02/kkp-akselerasi-pembangunan-pps-belawan.html>
8. <https://www.kabarparlemen.com/2022/02/21/komisi-iv-dpr-apresiasi-pemulihan-mangrove-di-sumut/>
9. <https://www.hetanews.com/article/236256/bulog-sumut-siapkan-5040-liter-minyak-goreng-bantu-penurunan-harga>
10. <https://www.kompas.tv/article/263707/bulog-jamin-stok-beras-aman-hingga-idul-fitri>
11. <https://www.bicaraindonesia.net/lakukan-reses-komisi-iv-dpr-ri-apresiasi-klinik-ekspor-di-karantina-pertanian-medan/>
12. <https://www.tagar.id/komisi-iv-dpr-ri-apresiasi-klinik-agro-ekspor-di-karantina-pertanian-medan>
13. <https://www.jpnn.com/news/komisi-iv-dpr-ri-apresiasi-klinik-agro-ekspor-di-karantina-pertanian>